

KONSEP PENDIDIKAN MAHAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh; Jamaluddin Thaib¹

ABSTRAK

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu sebuah proses interaksi pendidikan antara seorang guru dengan murid. Ini artinya bahwa jika di suatu tempat ada murid dan guru dan keduanya melakukan peran mereka masing-masing, maka di sana telah terjadi proses belajar dan mengajar dan bahkan juga pendidikan. dalam sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad saw. proses pendidikan telah berlangsung, bahkan secara lebih sederhana, yang bertempat di masjid, di pasar atau di rumah-rumah masyarakat. dengan cara setiap ayat al-Qur'an turun yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, segera oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Cara-cara seperti ini ternyata hasilnya sangat baik. Nabi sebagai sosok orang yang dipercaya, dicintai, dan benar-benar diteladani memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakatnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan menjadi rumit tatkala sudah dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang lebih luas. Pendidikan menjadi tidak mudah ketika sudah dikaitkan dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan lain-lain. Pendidikan menjadi lebih rumit lagi tatkala harus ditangani oleh birokrasi pendidikan. Bahkan biaya birokrasi pendidikan bisa jadi lebih mahal di banding dengan biaya penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.

Kata Kunci, Pendidikan mahal, dampak, Sumber Daya Manusia

A. Pendahuluan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu sebuah proses interaksi pendidikan antara seorang guru dengan murid. Ini artinya bahwa jika di suatu tempat ada murid dan guru dan keduanya melakukan peran mereka masing-masing, maka di sana telah terjadi proses belajar dan mengajar dan bahkan juga pendidikan.

Oleh karena itu, dalam sejarah Islam, dimana pada zaman Nabi Muhammad saw. pun proses pendidikan telah berlangsung, bahkan secara lebih sederhana, yang bertempat di masjid, di pasar atau di rumah-rumah masyarakat. dengan cara setiap ayat al-Qur'an turun yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, segera oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Kebanyakan mereka menghafal dan ada juga yang menuliskannya. Jika terjadi atau ada sesuatu yang kurang jelas, maka secara langsung ditanyakan kepada nabi. Nabi akan memberikan penjelasan atau jalan keluarnya. Cara-cara seperti ini ternyata hasilnya sangat baik. Nabi sebagai sosok orang yang dipercaya, dicintai, dan

¹ Dosen tetap dan Ketua STAI Yayasan Tgk Chik Pante Kulu Darussalam Banda Aceh

benar-benar diteladani memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakatnya.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan menjadi rumit tatkala sudah dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang lebih luas. Pendidikan menjadi tidak mudah ketika sudah dikaitkan dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan lain-lain. Pendidikan menjadi lebih rumit lagi tatkala harus ditangani oleh birokrasi pendidikan. Bahkan biaya birokrasi pendidikan bisa jadi lebih mahal di banding dengan biaya penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh, gedung kantor pendidikan dengan berbagai fasilitasnya memerlukan dana lebih besar daripada biaya pertemuan antara guru dan murid

Padahal pendidikan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa menuju masyarakat yang berkualitas dan bermartabat. Masalah disana-sini masih sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat dikalangan bawah. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi salah satu tujuan Negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mempunyai konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah.

Setiap keluarga harus memiliki perencanaan terhadap keluarganya sehingga dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal maka pendidikan yang diberikan pada anak akan terus sehingga anak tidak akan putus sekolah. Tanggung jawab orang tua sangatlah berat karena harus membiayai anak sejak dia lahir sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Di zaman yang sudah serba canggih dan modern seperti sekarang, masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah secara formal dengan alasan biaya.

Adanya fenomena tersebut bisa dijadikan salah satu indikator, banyaknya PR dalam dunia pendidikan saat ini. Salah satu hal yang menjadi persoalan mendasar bangsa ini adalah persoalan biaya pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya pendidikan di Indonesia termasuk di Aceh saat ini semakin hari semakin mahal. Hal itu tidak hanya terjadi di sekolah swasta, di sekolah-sekolah negeri pun seperti di SMAN 10 umpamanya, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan ketika mendaftar dan ingin masuk di sekolah tersebut, hal yang pertama yang menjadi pertanyaan dari para pengelola adalah bagaimana penghasilan dan apa pekerjaan dari orang tua.

Kalau orang tua hanya karyawan biasa atau bahkan hanya seorang petani, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut tidak dapat masuk di sekolah tersebut.

Mahalnya biaya pendidikan seperti di atas tidaklah sebanding dengan daya beli masyarakat, sehingga anak-anak akan banyak yang kehilangan prestasi dan kesempatan terbaiknya, atau paling tidak untuk mendapat pendidikan yang baik dan berkualitas semakin jauh dari harapan, pendidikan berkualitas seakan-akan hanya menjadi milik anak pejabat, ataupun pengusaha, sementara untuk anak-anak yang tidak mampu hanya boleh mendapat pendidikan yang seadanya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan, dalam konteks pendidikan Islam semakna dengan kata *tarbiyah*, *ta'dib*, dan *ta'lim*. Namun secara umum kata *tarbiyah* sering digunakan untuk pengertian pendidikan Islam. Menurut H. Ramyulis dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam*, "dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata *al-tarbiyat*, namun terdapat istilah lain yang seakar dengannya, yaitu *al-rabb*, *rabbayani*, *murabby*, *yurby* dan *rabbany*. Dalam al-Sunnah ditemukan kata *rabbaniy*".²

Secara *etimologis*, pendidikan diartikan sebagai perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik; dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, bathin dan sebagainya". Pengertian pendidikan secara terminologis, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 angka 1, bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".

Abul A'la al-Maududi, seperti dikutip Ramayulis berpendapat, bahwa kata *rabbun* (*raba*) terdiri dari dua huruf "ra" dan "ba" tasydid. Kedua kata itu merupakan pecahan dari kata *tarbiyah* yang berarti "pendidikan, pengasuhan, dan sebagainya". Kata tersebut juga memiliki beragam arti antara lain: "kekuasaan, perlengkapan, pertanggungjawaban, perbaikan, penyempurnaan,

² Ramyulis. *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. Ke-7, (Jakarta, Kalam Mulia, 2008), hlm.

dan lain-lain".³ Mushtafa al-Maraghy, menyatakan kata itu merupakan predikat bagi suatu "kebesaran, keagungan, kekuasaan, dan kepemimpinan".⁴

Pengertian secara etimologis dari *tarbiyah* seperti dikemukakan oleh para ahli pendidikan tersebut di atas memiliki keragaman arti yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan dan perkembangan secara fisik serta peningkatan kemampuan, pemeliharaan secara psikhis peserta didik yang harus dilakukan melalui proses pendidikan

Sementara Ki Hajar Dewantara (1889 - 1959) menjelaskan bahwa pendidikan pada umumnya memiliki arti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Ibnu Muqaffa (salah seorang tokoh bangsa Arab yang hidup tahun 106 H-143 H, pengarang Kitab Kalilah dan Daminah) mengatakan bahwa : Pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santan akal dan rohani.

Dari beberapa pengertian pendidikan di atas dapat disimpulkan mengenai Pendidikan, bahwa Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

2. Kondisi Pendidikan Indonesia saat ini

Meskipun sudah merdeka lebih dari setengah abad, akan tetapi mutu pendidikan Indonesia dapat dikatakan masih sangat rendah dan memprihatinkan. Dimana Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, masih berada di bawah standar sebagaimana yang diharapkan

Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan dibidangnya masing-masing dan diharapkan dapat

³ Ramyulis. *Ilmu Pendidikan ...*, hlm. 14.

⁴ Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-1, (Bairut: Dar Fikr, tt.), hlm.

mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain.

Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA sehingga akan menghasilkan efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Sementara itu dalam sebuah survei yang lain dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultant (PERC), bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.⁵

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2007) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).

Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat terlihat bahwa dalam sistem pendidikan di Indonesia terdapat ada masalah yang serius. Bila ditinjau secara perspektif ideologis (prinsip) dan perspektif teknis (praktis), terhadap berbagai masalah tersebut, maka secara umum dapat dikategorikan kepada 2 (dua) masalah utama yaitu :

Pertama, masalah mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. Kedua, masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek

⁵Daniel MOH Rosyid. 2006. *Mahal-Pendidikan-Bermutu-Rendah*. <http://pendidikan-alternatif.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 12 Desember 2012..

praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalny biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, dan sebagainya.

Mahalny pendidikan masih menjadi perbincangan dan permasalahan masyarakat setiap kali pergantian tahun ajaran, bukan hanya terjadi pada sekolah swasta tetapi juga sekolah yang berstatus negeri. Orang tua siswa harus berfikir kembali untuk melanjutkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi akibat semakin tingginya biaya pendidikan. Sehingga muncul sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa "orang miskin dilarang sekolah".⁶

Padahal pendidikan adalah suatu bentuk hak asasi yang harus dipenuhi dari lembaga atau institusi yang berkewajiban memenuhinya secara merata, sehingga semua masyarakat dalam suatu bangsa tersebut dapat menikmatinya. Bukannya hanya ditujukan untuk orang yang mampu membayarnya. Mengingat pentingnya pendidikan untuk semua warga, sehingga posisinya sebagai salah satu bidang yang mendapat perhatian serius dalam konstitusi Negara kita, dan menjadi salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Negara dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.

3. Penyebab Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalny biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Makin mahalny biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, "sesuai keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat

⁶Anonim. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. <http://www.sinarharapan.com>. Diunduh Tanggal 12 Desember 2012.

implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.

Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan public khususnya sektor pendidikan, tidak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).⁷

Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar.

Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar menilai bahwa dengan privatisasi

⁷Nakoela Soenarto. 2005. *Biaya Pendidikan di Indonesia: Perbandingan pada Zaman Kolonial Belanda dan NKRI*. <http://www.kompas.com>. Diambil Tanggal 12 Des. 2012.

pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.⁸

Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda Kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya. Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk 'cuci tangan'.

4. Dampak Mahalnya Pendidikan

Secara umum bahwa dampak dari mahalnya biaya pendidikan dapat mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut, di antaranya adalah:

a. Lemahnya Sumber Daya Manusia

Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar

⁸ Koran Republika, 10 Mei 2008.

SDM di Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya. Sebagai salah satu entity atau elemen yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan, pelajar merupakan pihak yang paling merasakan seluruh dampak dari perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut baik atau buruk.

Permasalahan yang ikut membawa dampak sangat besar pada pelajar adalah permasalahan mengenai mahalny biaya pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini dinilai sebagai permasalahan klasik yang terus muncul kepermukaan dan belum selesai hingga sekarang. Padahal, tingginya biaya pendidikan saat ini tidak sesuai dengan mutu atau kualitas serta output pendidikan itu sendiri. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari masih tingginya persentase pengangguran terdidik (Sarjana) yaitu sekitar 1,1 juta orang (Data BPS - 2010). Penyebab banyaknya pengangguran terdidik ini terlihat beragam dan menjadi semakin ironis jika dilihat dari mahalny seorang pelajar (terdidik) telah membayar uang kuliah atau uang sekolah mereka.⁹

b. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat

Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi. Tyler mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudia akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu Jones melihat pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Jones melihat, bahwa pendidikan memiliki suatu kemampuan untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja potensial, dan menjadi lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu tingkat produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan nasional. Menurutnya, korelasi antara pendidikan dengan pendapatan tampak lebih signifikan di negara yang sedang membangun. Sementara itu Vaizey melihat pendidikan menjdi sumber utama bakat-bakat terampil dan terlatih. Pendidikan memegang peran penting dalam penyediddan tenaga kerja. Ini harus menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan, karena pranata ekonomi membutuhkan tenaga- tenaga terdidik dan terlatih.

Permasalahan yang dihadapi adalah jarang ada ekuivalensi yang kuat antara pekerjaan dan pendidikan yang dibutuhkan yang mengakibatkan

⁹Soedijarto. *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993), hal. 34

munculnya pengangguran terdidik dan terlatih. Oleh karena itu, pendidikan perlu mengantisipasi kebutuhan. Ia harus mampu memprediksi dan mengantisipasi kualifikasi pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Prediksi ketenagakerjaan sebagai dasar dalam perencanaan pendidikan harus mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan sosial ekonomi dari pemerintah.

5. Cara Mengatasi Mahalnya Biaya Pendidikan

Besar dan kecilnya subsidi pemerintah itulah yang membuat mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh orang tua atau masyarakat. Kalau kita ingin biaya pendidikan tidak mahal maka subsidi pemerintah harus besar. Kecuali Jepang, Australia memiliki pengalaman bagus untuk membuat biaya pendidikan tidak mahal bagi masyarakat. Dengan mengembangkan konsep CBE, Community-Based Education, maka pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Mereka diminta membantu pemikiran, gagasan, dan dana untuk mengembangkan pendidikan baik melalui komite sekolah (school committee), dewan pendidikan (board of education), atau secara langsung berhubungan dengan pihak sekolah. Banyak hasil yang dipetik dari program ini.

Usaha untuk menjadikan pendidikan tidak mahal untuk 'dikonsumsi' orang tua dan masyarakat sebenarnya sudah dilaksanakan pemerintah Indonesia, baik dengan meningkatkan subsidi maupun membangkitkan partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan semacam ini juga ada dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sayangnya, pemerintah sendiri tidak konsisten dalam menjalankan ketentuan ini. Seandainya saja ketentuan UU dan UUD tersebut direalisasi maka sebagian permasalahan tentang mahalnya biaya pendidikan di negara kita tentu akan teratasi.

Usaha kedua yang sudah dicoba oleh pemerintah ialah membangkitkan peran serta masyarakat melalui dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah/madrasah di tingkat sekolah. Dalam Pasal 56 ayat (2) dan (3) dijamin eksistensi dan perlunya dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah untuk membantu sekolah, termasuk mengatasi mahalnya pendidikan bagi rakyat banyak. Sekarang hampir di seluruh kabupaten/kota dan provinsi sudah dibentuk lembaga yang disebut dewan pendidikan; di samping komite sekolah/madrasah yang dibentuk pada banyak sekolah. Sayangnya, banyak dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara benar. Celaknya, banyak dewan

pendidikan dan komite sekolah/madrasah hanya menjadi aksesori saja. Lagi-lagi kita tidak konsisten menjalankan konsep.

Sebenarnya kita sudah memiliki konsep yang bagus untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan. Namun, karena kita tidak bisa menghilangkan penyakit 'tidak konsisten', akhirnya biaya pendidikan kita pun tetap mahal bagi masyarakat kebanyakan.

Sekarang hampir di seluruh kabupaten/kota dan provinsi sudah dibentuk lembaga yang disebut dewan pendidikan; di samping komite sekolah/madrasah yang dibentuk pada banyak sekolah. Sayangnya, banyak dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara benar. Celakanya, banyak dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah hanya menjadi aksesori saja.

C. Penutup

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Adapun mahalnya pendidikan di Indonesia akan berpengaruh secara langsung terhadap: Lemahnya sumber daya manusia dan lemahnya taraf ekonomi masyarakat. Sementara untuk menangani masalah mahalnya biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Memperbesar dana APBN untuk pendidikan, yaitu sesuai dengan undang-undang sebesar 20% dari total APBN dan hal itu dapat diwujudkan secara nyata. Di samping juga melibatkan unsur masyarakat, terutama mereka yang mampu secara ekonomi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- .Nakoela Soenarto. 2005. *Biaya Pendidikan di Indonesia: Perbandingan pada Zaman Kolonial Belanda dan NKRI*. <http://www.kompas.com>. Diambil Tanggal 12 Des. 2012.
- Anonim. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. <http://www.sinarharapan.com>. Diunduh Tanggal 12 Desember 2012.

Daniel MOH Rosyid. 2006. *Mahal-Pendidikan-Bermutu-Rendah*.
<http://pendidikan-alternatif.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 12 Desember 2012.

Koran Republika, 10 Mei 2008.

Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, Bairut: Dar Fikr, tt, juz ke-1

Ramyulis. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2008, Cet. Ke-7

Soedijarto. *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993